

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan merupakan ungkapan kewajiban nasional kepada warga negaranya dan sarana partisipasi dalam pembiayaan nasional dan pembangunan nasional (Asri Ayu Lestari et al., 2021). Perpajakan di Indonesia di latarbelakangi oleh masa kerajaan di Indonesia dimana pada saat itu masyarakat diminta iuran sukarela oleh kerajaan sebagai tanda penghormatan kepada raja setempat, perkembangan perpajakan mulai terlihat ketika masa kolonialisme dimana pada zaman kependudukan Negara Belanda dan Negara Jepang di Indonesia dimana masyarakat diminta membayar Upeti yang awalnya hanya sebagai iuran diganti sebagai pungutan yang pembayarannya diwajibkan dengan alasan untuk memperbaiki infrastruktur tetapi masyarakat merasa dirugikan karena sifatnya dipaksakan dan juga kurangnya keadilan pada zaman itu, dengan demikian perpajakan di setiap zamanya mengalami perubahan-perubahan yang kian membaik.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat serta salah satu sumber pendapatan negara yang berkaitan dalam perekonomian di Indonesia.

Pendapatan pemerintah Indonesia bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak, pendapatan yang bersumber dari pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Penghasilan yang bersumber dari pajak berfungsi sebagai dana untuk kepentingan umum seperti fasilitas kesehatan masyarakat, sarana pendidikan, pembangunan infrastruktur dan sebagainya.

Sumber pendapatan negara dan juga daerah yang paling besar adalah pajak. (Latofah & Harjo, 2020), Pajak juga merupakan sebagai wujud pengabdian masyarakat kepada negara karena telah berkontribusi dalam pembangunan nasional, dimana pendapatan yang di terima negara dari pajak ini diolah kembali sebagai dana APBN dan juga dana APBD yang akan di salurkan ke daerah-daerah dan juga sebagai pendanaan negara, yang digunakan untuk membangun daerah dan juga sebagai sumber keberlangsungan suatu negara. Dengan melihat masih kecilnya pendapatan pajak pada daerah dan juga kurang meratanya tingkat pembangunan maka dibentukkan suatu sistem desentralisasi atau yang disebut sebagai kebijakan otonomi daerah, dimana salah satu tujuan dari otonomi daerah ini untuk menciptakan kemandirian suatu daerah terhadap penyerapan anggaran dan pemerataan pembagunan daerah tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis Pajak Daerah meliputi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi sendiri terdiri dari lima jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Jenis Pajak Provinsi yang menjadi sumber penerimaan pajak daerah paling besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Melihat dari hal tersebut Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan sektor pajak yang sangat potensial bagi pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah dengan begitu perlunya suatu indikator untuk menganalisis pajak ini setiap tahunnya, besarnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah ini dikarenakan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya, mengingat kendaraan bermotor saat ini menjadi komoditas utama masyarakat untuk beraktifitas sehari-hari.

Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah

Tahun	Jenis Kendaraan Bermotor				Jumlah
	Mobil Penumpang	BUS	Truck	Sepedah Motor	
2017	774.469	35.311	505.478	8.967.934	10.283.192
2018	1.141.860	35.941	546.161	14.851.548	16.575.510
2019	1.231.026	37.238	563.605	15.627.624	17.459.493
2020	1.309.343	37.785	580.411	16.214.173	18.141.712
2021	1.711.112	44.160	647.811	17.917.660	20.320.743

Sumber: BPS Jawa Tengah yang diolah kembali

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah terus meningkat dari tahun ke tahun, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah ini sangat erat kaitannya dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan juga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang

mana dengan meningkatnya kendaraan bermotor tersebut sudah seharusnya meningkat pula penerimaan dari pos Pajak Kendaraan Bermotor dan juga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Pendapatan Asli Daerah, oleh karena itu Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selaku penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah yang pemenuhannya dibebankan kepada masyarakat perlu adanya pengawasan terhadap pencapaian pajak daerah agar terciptanya optimalisasi penerimaan pajak untuk mencapai Pendapatan Asli Daerah yang sudah direncanakan.

Efektivitas adalah sejauh mana strategi mencapai tujuannya. Mengukur keefektifan layanan melibatkan membandingkan hasil akhirnya dengan *output* yang di tetapkan (Putri, 2019). Melalui efektivitas dapat diketahui kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi *rill* daerah, dengan begitu kita juga dapat melihat apakah penerimaan yang di dapat bisa menjadi kontributor utama atau tidak dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah. Target dan realisasi penerimaan PKB dan BBNKB Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. 2 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

TAHUN	REALISASI PKB	PERSENTASE	REALISASI BBNKB	PERSENTASE
2018	4.248.132.806.425	0,00%	3.423.363.674.275	0,00%
2019	4.618.496.197.625	8,72%	3.414.320.120.325	-0,26%
2020	4.579.535.646.300	-0,84%	2.228.465.305.800	-34,73%
2021	4.758.837.286.600	3,92%	2.775.978.070.000	24,57%
2022	5.432.537.592.000	14,16%	2.886.089.450.650	3,97%

Sumber: Sumber: Diolah Penulis (2023)

Berdasarkan tabel realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 cenderung mengalami peningkatan dan telah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya tetapi pada tahun 2020 terdapat penurunan yang cukup signifikan, meskipun mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2021 kembali mengalami peningkatan meskipun belum mencapai target atau tidak terlalu signifikan.

Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk tahun 2017-2021 cenderung menunjukkan grafik yang fluktuatif, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah penerimaan yang fluktuatif ini dikarenakan masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang menyebabkan masyarakat Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan ekonomi yang cukup signifikan, jadi masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan primernya terlebih dahulu dibandingkan dengan kewajiban pajaknya. Melihat hal itu Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan program pengembangan berupa SAMSAT BUDIMAN yang diharapkan bisa menambah penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut.

Penelitian yang dilakukan Mokoginta (2015) menyatakan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat dikatakan efektif. Sedangkan, menurut (Tarigan et al., 2022) menyatakan hasil dari efektifitas pajak kendaraan bermotor tahun 2017-2021 dinilai kurang efektif dan kontribusinya terhadap PAD kurang, sehingga disarankan untuk melakukan evaluasi mengapa anggaran tidak mencapai realisasinya. Dalam

tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik menurut (Ningsih et al., 2021) menyatakan bahwa berkontribusi terhadap PAD. Sedangkan, menurut (Rizal & Hidayah, 2018) menyatakan bahwa kurang berkontribusi terhadap PAD.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih perlu dioptimalkan guna meningkatkan Penadapatan Asli Daerah maka perlu di ketahui potensi-potensi yang dapat menambah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta mengetahui strategi dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam menentukan target penerimaan dan realisasi untuk tahun berikutnya untuk mendapatkan penerimaan yang efektif di tengah pertumbuhan ekonomi di Negara Indonesia yang sedang mengalami peningkatan pasca pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Prinsip efektivitas dalam hal ini berguna menjadi kontrol bagi penerimaan yang diperoleh dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan target yang sudah di tentukan sebelumnya dan juga mengkaji seberapa besar kontribusi dan pengaruh Pajak Kenadraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dimana dalam hal kontribusi ini diperoleh dari pembagian realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Pajak Daerah. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun analisis dengan judul “EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2018-2022”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan data diatas terlihat bahwa peningkatan objek PKB dan BBNKB setiap tahunnya mengalami peningkatan yang ditandai dengan terus meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Jawa Tengah, tetapi berbanding terbalik dengan realisasi yang di dapat dalam PKN dan BBNKB di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami pasang surut, sehingga dengan uraian tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor Provinsi Jawa Tengah sudah efektif?
2. Apakah tingkat penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor Provinsi Jawa Tengah sudah efektif?
3. Seberapa jauh tingkatan kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah?
4. Seberapa jauh tingkatan kontribusi penerimaan bea balik nama Kendaraan bermotor terhadap PAD Privinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Menganalisis dan menghitung efektifitas PKB apakah pada tahun berjalan memiliki efektivitas yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah.

2. Menganalisis dan menghitung efektifitas BBNKB apakah pada tahun berjalan memiliki efektifitas yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah.
3. Menganalisis seberapa jauh kontribusi PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah.
4. Menganalisis seberapa jauh kontribusi BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagi Penulis

Menambah Pengetahuan dengan mampu menghitung dan menganalisis tingkat efektifitas dan tingkat kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian tentang Pajak kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah, penelitian ini menjadi pengalaman baru bagi penulis untuk membuka wawasan tentang dunia perpajakan khususnya dalam pajak daerah, penulis dapat menganalisis dengan mempraktikan teori yang didapat pada saat kuliah dengan objek penelitian.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini bisa menjadi bahan informasi, masukan, ataupun suatu pertimbangan bagi instansi-instansi berwenang yang berkaitan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk melakukan koreksi terhadap penyerapan Pajak Daerah, peningkatan pelayanan, dan penetapan keputusan yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika ini berisi tentang penulisan yang di gunakan penulis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang disampaikan, berikut merupakan sistematika penulisannya :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan di teliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang uraian mengenai pajak daerah, pengertian pajak daerah, jenis-jenis pajak daerah, tata cara pemungutan pajak daerah, dasar hukum PKB, pengertian PKB, objek PKB, sebjek PKB, dasar pengenaan PKB, tarif PKB, perhitungan PKB, dasar hukum BBNKB, pengertian BBNKB, objek BBNKB, subjek BBNKB, dasar pengenaan BBNKB, tarif BBNKB, perhitungan BBNKB, pengertian dan presentase efektivitas dan kontribusi, dan krangka pemikiran

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai klasifikasi data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode penelitian.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Memuat hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum tentang Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, pembahasan terkait pajak daerah provinsi jawa tengah, pendapatan asli daerah provinsi jawa tengah, efektivitas serta kontribusi pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2018-2022.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan saran yang ditujukan kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Landasan teori sebagai landasan dasar riset yang menjadi tonggak terpenting supaya penelitian yang dilakukan mempunyai dasar yang kuat, bukan hanya perbuatan coba-coba (Sugiyono, 2022). Teori yang digunakan bukan hanya sekedar pendapat dari pengarang atau pendapat lain, tetapi teori yang digunakan adalah teori yang telah teruji kebenarannya. Dalam landasan teori yang harus diperhatikan yaitu: (1) terdapat nama pencetus teori tersebut, (2) tahun dan tempat pertama kali, (3) terdapat uraian ilmiah pada teori, (4) hubungkan teori – teori yang ada dengan upaya penelitian guna mencapai tujuan atau target penelitian.

2.1.1 Teori Institusional

Teori Institusional adalah teori sosiologis yang berusaha menjelaskan struktur organisasi (Scott, 1995). Teori Ini menjelaskan suatu struktur dimana suatu organisasi mengadopsi sesuatu sesuai dengan kode etik dan budaya yang mengarah pada legitimitasi dan dukungan dari eksternal organisasi (Ahyaruddin, 2016). Organisasi tidak hanya berkompetisi untuk memperoleh sumber daya dan pelanggan, tetapi juga untuk kekuatan politik, legitimitasi institusi dan untuk kepentingan ekonomi sosial.

Menurut DiMaggio dan Powell tekanan dalam organisasi akan menimbulkan tiga mekanisme perubahan yaitu tekanan *coercive*, tekanan *normative*, dan tekanan *mimetic* (Valenty & Kusuma, 2019). Teori institusional ini

memprediksi bahwa organisasi akan menjadi lebih serupa dikarenakan oleh tekanan institusional, baik dikarenakan oleh adanya koersif (ketika organisasi terpaksa melakukan adopsi struktur atau aturan), normatif (ketika organisasi mengadopsi berbagai bentuk karena tuntutan profesional organisasi, sementara itu sendiri mengakui bahwa mereka superior), dan mimetik (ketika organisasi mengikuti atau meniru organisasi lainnya, biasanya disebabkan adanya ketidakpastian). Sedangkan Isomorfisme koersif merupakan bentuk tekanan eksternal, dimana suatu organisasi ada dalam tekanan yang mengharuskan untuk patuh pada aturan untuk mencapai tujuan.

Efektivitas dan kontribusi dalam penelitian ini menjadi faktor yang sejalan dengan Teori Institusional dimana dengan melihat hasil dari perhitungan efektivitas dan kontribusi bisa menjadi tekanan eksternal bagi organisasi atau instansi yang terkait, dengan penetapan peraturan baru yang diberikan oleh organisasi lain yang mengharuskan organisasi atau instansi terkait meniru budaya organisasi lain, dan membuat suatu keputusan yang tepat dalam menjalankan roda organisasi. Sebagaimana yang kita tahu Badan pengelola Pendapatan Daerah ini ialah badan yang membantu Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dimana sangat terpengaruh dalam pemberian keputusan yang bersifat institusional yang akan mempengaruhi penerimaan dan juga perubahan target yang berdampak kepada efektivitas dan kontribusi.

2.1.2 Efektivitas

Analisa efektivitas mengukur tingkat ke tercapaian target yang di tetapkan (Mahmudi, 2019). Efektivitas yang dimaksud disini yaitu penelitian

ini menunjukkan pencapaian pemerintah daerah atas tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan atau tidak. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “Efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil”, dengan begitu kita bisa melihat seberapa efektif suatu objek.

2.1.3 Kontribusi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian “Kontribusi adalah sumbangan”. Analisis kontribusi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat di sumbangkan dari penerimaan pajak terhadap PAD (Octovido, dkk, 2014), Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi atau sumbangsi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan mengukur nilai penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan juga jumlah realisasi pendapatan daerah.

2.1.4 Pajak Daerah

Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu Pajak Daerah tingkat I atau Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah tingkat II atau Pajak Daerah Kabupaten/Kota.

1. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Daerah Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

b. Bea Balik nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

2.1.5 Pajak Kendaraan Bermotor

Tungka & Sabijono (2015) pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kepemilikan dan / atau pengesuaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud pada UU No. 28 Tahun 2009 ayat 1 adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (*Gross Tonnage*).

2. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang – Undang Nomor 28

Tahun 2009 yaitu :

- a. Orang pribadi atau badan yang memiliki dan / atau menguasai kendaraan bermotor
- b. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor

- c. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

3. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan / atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2015 :

- a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan
- b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, instansi pemerintah
- d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar.

5. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB sesuai dengan rumus :

Tabel 2. 1 Perhitungan PKB

Pajak Terutang	=	Tarif Pajak	x	Dasar Pengenaan Pajak
	=	Tarif Pajak	x	(NJKB x Bobot)

2.1.6 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2021 adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

1. Objek Bea Balik Nama kendaraan Bermotor

Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menurut Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu :

- a) Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- b) Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang di oprasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang

dioprasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (*Lima Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (*tujuh Gross Tonnage*).

2. Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menurut Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu wajib pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

3. Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 menyatakan bahwa pengenaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu :

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang sudah diteytyapkan pada Harga Pasaran Umum (HPU)
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan tingkat pencemaran lingkungan akibat dari penggunaan kendaraan motor tersebut.

4. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 menyatakan bahwa tarif BBNKB yaitu :

1. Pengenaan BBNKB pada angkutan umum untuk orang pribadi ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2. Pengenaan BBNKB pada angkutan umum barang ditetapkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Pengenaan BBNKB pada kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk orang pribadi atau barang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pengenaan BBNKB pada kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pemerintah daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen).

5. Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Sehingga secara umum dapat di gambarkan rumus perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

$\text{Pajak Terutang} = \frac{\text{Tarif Pajak}}{\text{Tarif Pajak}} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$ $\text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor}$
--

2.1.7 Pendapatan Asli Daerah

Definisi Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah

pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pendapatan Daerah ini yang menjadi sumber pendanaan bagi daerah yang akan digunakan untuk mengurus hak dan kewajiban rumah tangganya sendiri, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengolah PAD nya sendiri dengan tujuan untuk mengembangkan daerah sesuai dengan wilayahnya untuk mewujudkan terciptanya pemerataan fasilitas dan pembangunan di suatu daerah agar meminimalisir adanya kesenjangan antar daerah yang dianggap masih perlu berkembang sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat (1), maka sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah yang peruntukan dananya yaitu untuk membiayai rumah tangga daerah itu sendiri yang bertujuan untuk meratakan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang berbeda sifatnya dengan pungutan pajak dimana pungutan ini secara peraturan adalah pungutan yang sah atau legal yang pembayaran dikarenakan pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah

bersangkutan, atau bisa juga diartikan sebagai iuran kepada daerah karena kita telah mendapat manfaat dari fasilitas daerah tersebut secara langsung.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat (2) meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan untuk menjadi pendukung dalam penelitian ini, selain menjadi pendukung penelitian terdahulu bisa meminimalisir terdapatnya kesamaan dengan penelitian ini serta dapat memperkuat teori yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Didalam tinjauan penelitian terdahulu menjelaskan terkait dengan pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap

Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi penelitian ini :

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Nimas Galuh & Ary Yunita, (2021)	X1 = Pajak Kendaraan Bermotor X2 = Bea Balik Nama Kendaraan Y = Pendapatan Asli Daerah	X1 = PKB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD X2 = BBNKB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD
2.	Juli Kristiani Br Tarigan, dkk (2022)	X1 = Pajak Kendaraan Bermotor X2 = Bea Balik Nama Kendaraan Y = Pendapatan Asli Daerah	X1 = PKB kurang efektif terhadap PAD X2 = BBNKB cukup efektif terhadap PAD
3.	Adnan Bensaadi, Myra Salsabila (2021)	X1 = Pajak Kendaraan Bermotor X2 = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Y = Pendapatan Asli Daerah	X1 = PKB berpengaruh terhadap PAD X 2 = BBNKB tidak berpengaruh terhadap PAD
4.	Muhammad Abdul Muis, Satria Adhitama (2021)	X1 = PKB X 2 = BBNKB X 3 = Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Y = PAD	X1 = PKB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD X 2 = BBNKB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD X 3 = Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap PAD

5.	Yani Rizal, Miftahul H (2018)	X1 = Pajak Kendaraan Bermotor X2 = Bea Balik Nama Kendaraan Y = Pendapatan Asli Daerah	X1 = PKB kurang berkontribusi terhadap PAD X 2 = BBNKB kurang berkontribusi terhadap PAD
----	-------------------------------	--	---

Sumber: Diolah Penulis (2023)

Savitri & Anggraeni(2021) Studi ini menemukan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor memiliki dampak positif yang signifikan atau bisa dikatakan efektif terhadap pendapatan asli daerah, sementara sebaliknya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor justru berpengaruh negatif atau tidak efektif terhadap pendapatan asli daerah

Tarigan et al.(2022) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kota Medan tidak mencukupi. diharap pemerintah dapat merampingkan pengumpulan pajak ini, mengambil langkah-langkah seperti pembebasan denda pajak untuk pajak yang menunggak, meningkatkan pendidikan publik tentang pentingnya membayar pajak, dan sektor-sektor lain yang mempengaruhi.

Bensaadi & Salsabila (2021), Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif selain data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKB lebih efektif dibandingkan dengan BBNKB-nya, penelitian tersebut pun menghasilkan bahwa kedua pajak tersebut hanya berkontribusi sedikit terhadap pendapatan asli daerah Aceh.

Abdul Muis & Adhitama, S.Sos.,M.si (2021) Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dan kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan pemerintah daerah. ditemukan bahwa PKB dan BBNKB dinilai efektif, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor juga dinilai sangat efektif, meskipun rasio keseluruhan berfluktuasi. Namun semuanya belum bisa menjadi kontributor terbesar bagi pendapatan DKI Jakarta.

Yani Rizal, Miftahul H (2018), perhitungan dalam penelitian menampilkan peningkatan penerimaan PKB dan BBNKB yang positif setiap tahunnya, namun hasil dari pengolahan yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa PKB dan BBNKB belum bisa menjadi kontributor utama dalam penyusunan PAD di Provinsi Aceh.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang di susun oleh empat komponen yaitu Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah .

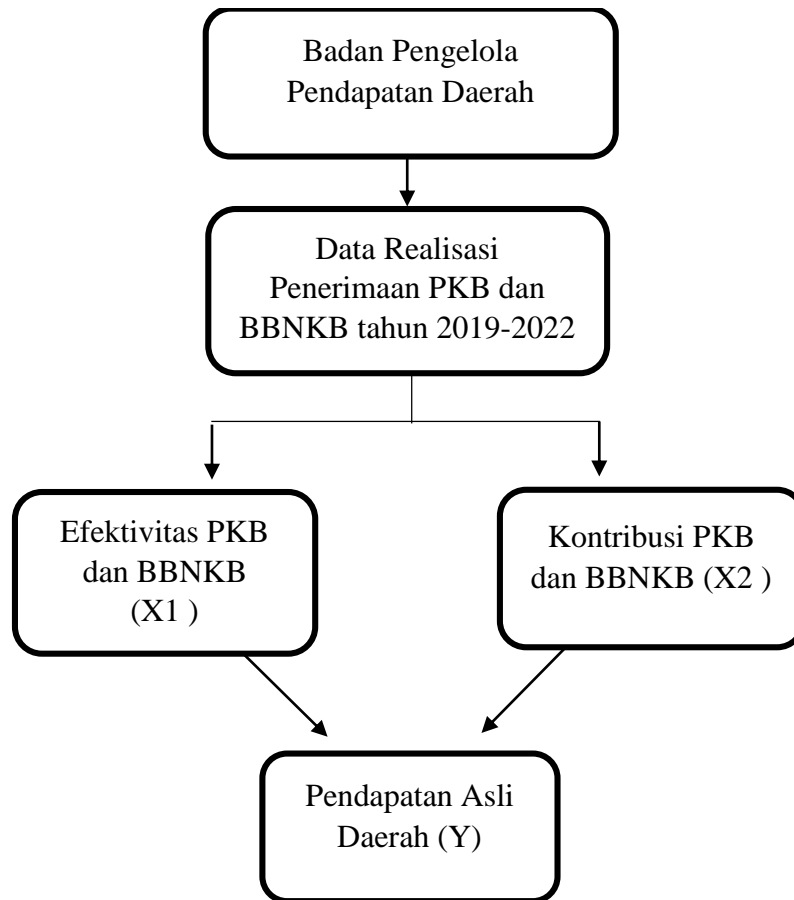
Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu sumber pembelanjaan daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah meningkat, maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan membangun daerah tersebut untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dengan

mengembangkan dan memperbanyak fasilitas umum yang dapat digunakan masyarakat untuk keperluan sehari-hari.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang tergabung dalam sub Pendapatan Pajak Daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan potensinya. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subyek dan obyek pajak daerah.

Menghitung efektivitas pajak daerah dan mengetahui kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperlukan data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak daerah. Efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

Mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah merupakan salahsatu langkah untuk melakukan optimalisasi untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan menetapkan kebijakan kedepanya yang dirasa dapat membantu menambah Pendapatan Asli Daerah tersebut.

Tabel 2. 4 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Variabel

Variabel adalah fenomena yang bervariasi dalam bentuk kualitas, kuantitas, mutu, dan standar (Bungin & Mashudi, 2022). Dengan demikian variabel dalam penelitian ini adalah efektivitas serta kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu (Sugiono,2022). Sesuai dengan yang telah di jelaskan diatas maka populasi pada penelitian ini adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dipunyai oleh populasi tersebut (Sugiono,2022). Pengambilan sampel ini dilakukan berdasarkan area tertentu, untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian-bagian yang berbeda di dalam suatu organisasi atau instansi. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah Laporan Penerimaan PKB dan BBNKB Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan melihat rasio untuk mengetahui efektivitas serta kontribusi Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian dimulai dengan mengumpulkan data seperti realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, target dan realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta data-data yang terkait dengan penelitian ini. Data yang sudah terkumpul lalu di analisis dengan menggunakan metode analisis rasio yang akan disajikan dalam tabel lalu di deskripsikan untuk menjelaskan tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.3.2 Sumber Data

Data Primer

Menurut (Sugiyono, 2019) data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari objek pajak yang sedang diteliti, data yang bersumber langsung dari observasi atau interaksi langsung dengan objek penelitian baik dalam bentuk kata-kata ataupun tindakan yang diamati. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini ialah wawancara dengan narasumber yaitu staf Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan, dan akan dijadikan sebagai pelenkap untuk memperjelas penelitian ini.

Data Sekunder

Data sekunder adalah segala bentuk dokumen ataupun informasi yang kita dapat dari dinas yang kita datangi untuk melakukan penelitian, baik itu berupa dokumen laporan ataupun dokumentasi dari dinas yang memiliki kaitan dengan

pendapatan asli daerah. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan penerimaan PKB dan BBNKB.

Berikut merupakan data sekunder yang didapat dari dinas terkait untuk penelitian :

- a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022
- b. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah 2018-2022
- c. Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah 2018-2022

3.4 Metode Pengumpulan Data

Berikut merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian :

1. Metode Kepustakaan

Metode pustaka ini dilakukan dengan melakukan serangkaian kegiatan kepustakaan dengan membaca berbagai macam literatur yang memiliki hubungan dengan penelitian, literatur yang dibaca dapat berupa catatan, buku, jurnal dan dokumen-dokumen historis yang relevan dengan penelitian yang kita lakukan.

2. Metode Lapangan

Metode Lapangan ini yang dilakukan dalam usaha memperoleh data untuk menunjang penelitian ini, dengan cara mendatangi dinas yang terkait dengan penelitian seperti Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau hanya jawab secara langsung dengan responden, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan objek yang akan diteliti. Dalam

hal ini pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah serta pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan penerimaan pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah.

3.5 Waktu dan Tempat Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 8, Purwosari, Semarang Utara, Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah.

2. Waktu Penelitian

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

No.	Keterangan Kegiatan	Waktu Kegiatan				
		Februari	Maret	April	Mei	Juni
1.	Penyusunan					
2.	Revisi Proposal					
3.	Penelitian					
4.	Analisis Data					
5.	Penyusunan Hasil					
6.	Sidang Hasil					

3.6 Metode Analisis

Penelitian menggunakan Prinsip deskriptif kuantitatif rasio efektivitas dan analisis kontribusi dengan pendekatan melalui wawancara yaitu suatu sistem pemikiran atau suatu metode peninjauan yang berusaha menggambarkan dan menyajikan keadaan pada saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif ini

bertujuan untuk menggambarkan tentang efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berikut merupakan Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini :

1. Analisis Efektivitas PKB dan BBNKB

Analisis efektivitas ini mampu menunjukkan persentase kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan penerimaan pajak sesuai dengan penerimaan pajak yang ditargetkan

$$\text{Efektivitas PKB dan BBNKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB}}{\text{Target Penerimaan PKB dan BBNKB}} \times 100\%$$

Berikut merupakan tabel kriteria dalam menilai efektivitas penerimaan PKB dan BBNKB:

Tabel 3. 2 Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: (Mahmudi, 2019)

2. Analisis Kontribusi PKB dan BBNKB

Kontribusi penerimaan PKB dan BBNKB adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan penerimaan PKB dan BBNKB terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk menghitung kontribusi penerimaan PKB dan BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi PKB dan BBNKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi :

Tabel 3. 3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Peresentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: (Nababan & Putra, 2018)

baik antar individu yang ada di dalam instansi tersebut untuk mencapai tujuan tertentu dan saling memiliki hubungan yang baik antar bagian. Untuk menggambarkan hubungan tersebut maka dibuatlah struktur organisasi sehingga jelas batas-batas wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian.

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi BAPENDA Provinsi Jawa Tengah

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub fungsional pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Pengelola Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

1. Menyusunan kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan lain, serta evaluasi dan pembinaan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan lain, serta evaluasi dan pembinaan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengolahan data, dan pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan lain, serta evaluasi dan pembinaan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang pengolahan data, dan pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan lain, serta evaluasi dan pembinaan;

5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Penapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Dengan itu dirasa perlu mengetahui pertumbuhan target dan realisasi untuk mengetahui perkembangan tahun berjalan ini. Berikut merupakan perhitungan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022:

Tabel 4. 1 Pertumbuhan Target PAD Provinsi Jawa Tengah

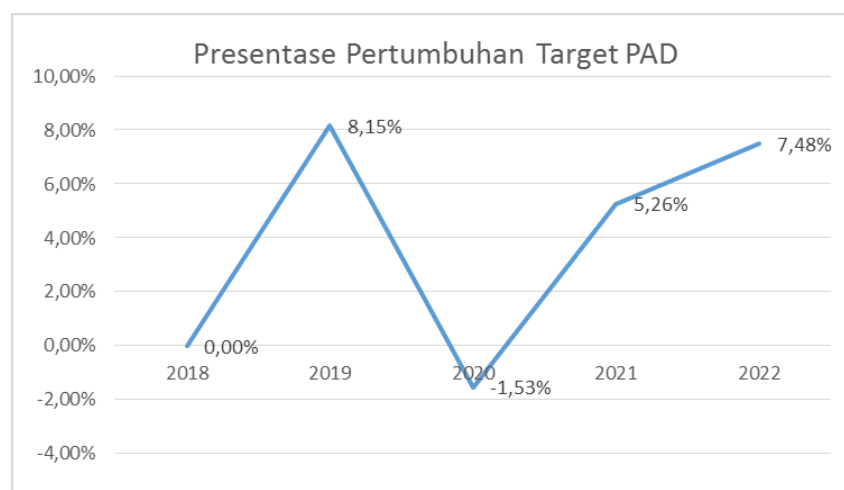
Tahun	Target	Target Tahun Sebelumnya	Target Realisasi	Presentase Pertumbuhan Target PAD
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4) / (3) x 100%
2018	13.396.772.661.000	13.396.772.661.000	-	0,00%
2019	14.488.333.544.000	13.396.772.661.000	1.091.560.883.000	8,15%
2020	14.267.084.822.000	14.488.333.544.000	-221.248.722.000	-1,53%
2021	15.017.805.797.000	14.267.084.822.000	750.720.975.000	5,26%
2022	16.141.754.406.000	15.017.805.797.000	1.123.948.609.000	7,48%
Rata-Rata				3,87%

Sumber: Data Sekunder yang diolah kembali (2023)

Berdasarkan perhitungan diatas, terlihat presentase pertumbuhan target yang di tentukan BAPENDA Provinsi Jawa Tengah selama tahun berjalan, dimana peningkatan pertumbuhan target terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar

Rp.1.091.560.883.000 yang menunjukkan hasil positif, sementara pertumbuhan target terkecil terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.-221.248.722.000 yang bersifat negatif. Untuk mengetahui perbandingan tingkat pertumbuhan target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022. maka penulis membuat suatu grafik agar memperjelas mengenai gambaran Pertumbuhan Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 berikut merupakan grafik yang menunjukkan Pertumbuhan Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022:

Grafik 4. 1 Pertumbuhan Target PAD Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Olah Data (2023)

Berdasarkan perhitungan dan juga grafik pertumbuhan menunjukkan bahwa pertumbuhan target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah bersifat positif dengan rata-rata pertumbuhan 3,87%, Pertumbuhan target tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2019 yang menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 8,15%, sedangkan pertumbuhan target terendah terjadi pada tahun anggaran 2020 yang

menunjukkan pertumbuhan negatif yang sangat signifikan yaitu sebesar -1,35%, berfluktuatifnya pertumbuhan target ini di dasari dengan menurunnya daya beli masyarakat dan juga menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat akibat adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang mengharuskan Pemerintah Daerah mengambil kebijakan yang tepat dengan menurunkan Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah merupakan wujud dari pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah untuk mencapai target yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dengan menghitung pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah berikut:

Tabel 4. 2 Pertumbuhan Realisasi PAD Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Realisasi	Realisasi Tahun Sebelumnya	Pertumbuhan Realisasi	Presentase Pertumbuhan Realisasi PAD
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4) / (3) x 100%
2018	13.711.836.037.849	13.711.836.037.849	-	0,00%
2019	14.437.779.112.256	13.711.836.037.849	725.943.074.407	5,29%
2020	13.668.282.278.855	14.437.779.112.256	-769.496.833.401	-5,33%
2021	14.697.721.017.860	13.668.282.278.855	1.029.438.739.005	7,53%
2022	16.264.700.573.304	14.697.721.017.860	1.566.979.555.444	10,66%
Rata-Rata				3,63%

Sumber: Data Sekunder yang diolah kembali (2023)

Berdasarkan perhitungan Tabel 4.2 diatas, pertumbuhan realisasi PAD menunjukkan pertumbuhan yang berfluktuatif dimana tingkat pertumbuhan terendah yaitu sebesar Rp.-769.496.833.401 pada tahun 2020 yang menunjukkan sifat negatif. Sementara pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar

Rp.1.566.979.555.444, maka dapat digambarkan grafik untuk memperjelas perbandingan pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022.

Grafik 4. 2 Pertumbuhan Realisasi PAD Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Data Sekunder yang diolah kembali

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan realisasi menunjukkan hasil yang positif dengan rata-rata 3,63%. Pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 10,66%. Sedangkan pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah terendah terjadi pada tahun 2020 yang menunjukkan pertumbuhan negatif dengan angka -5,33%. Hal ini menandakan bahwa selama tahun 2018-2022 realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi, pencapaian realisasi tahun tersebut dinilai masih kurang optimal, dikarenakan rata-rata pertumbuhan realisasi masih sedikit dibawah pertumbuhan target, hal ini menandakan perlu adanya optimalisasi dalam penyerapan PAD oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku badan yang berwenang.

4.2.2 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor sebagai salahsatu penyokong Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah tentu mejadi salahsatu sub penyumbang penerimaan terbesar untuk daerah, kita bisa mengetahui saat ini kendaraan bermotor sangat banyak diminati oleh masyarakat untuk kegiatan sehari-hari, melihat banyaknya kecenderungan masyarakat menggunakan kendaraan bermotor ini pula menjadi ladang bagi instansi terkait untuk mengelola penerimaan dan target dari banyaknya objek pajak yang ada di suatu daerah.

Potensi yang dimiliki tersebut kita perlu mengetahui pertumbuhan target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ini sebagai koreksi dan optimalisasi kedepanya bilamana ada hal yang dirasa kurang optimal dalam menentukan target ataupun penerimaan pendapatan.

Berikut merupakan target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Proovinsi Jawa Tengah:

Tabel 4. 3 Target dan Realisasi PKB 2018-2022

TAHUN	TARGET BBNKB	REALISASI BBNKB
2018	3.145.682.000.000	3.423.363.674.275
2019	3.443.363.700.000	3.414.320.120.325
2020	3.150.000.000.000	2.228.465.305.800
2021	3.150.000.000.000	2.775.978.070.000
2022	3.466.000.000.000	2.886.089.450.650

Sumber: Data Sekunder yang diolah kembali (2023)

Melihat tabel 4.3 diatas kita dapat menghitung pertumbuhan target dan pertumbuhan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor selama lima tahun terakhir,

berikut merupakan Tabel Pertumbuhan Target Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tahun 2018-2022:

Tabel 4. 4 Pertumbuhan Target PKB 2018-2022

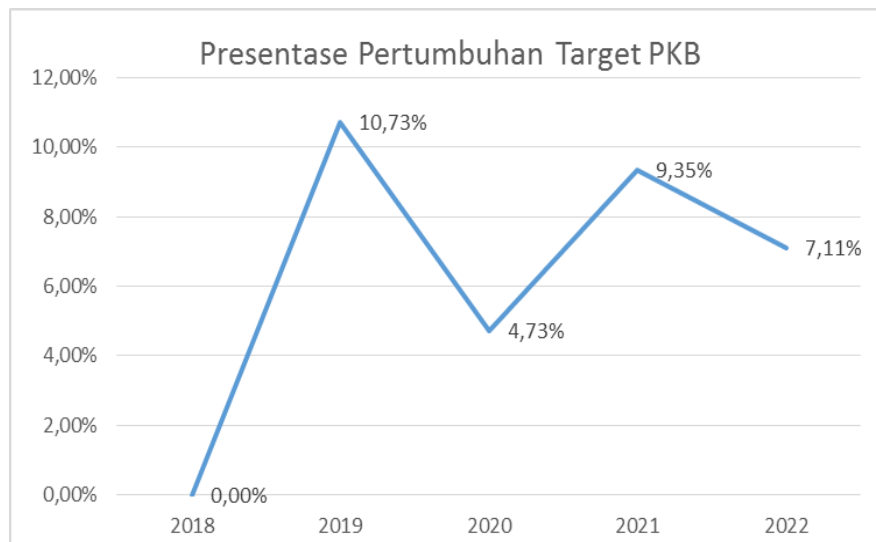
Tahun	Target	Target Tahun Sebelumnya	Pertumbuhan Target	Presentase Pertumbuhan Target PKB
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4) / (3) x 100%
2018	4.064.855.000.000	4.064.855.000.000	-	0,00%
2019	4.501.131.000.000	4.064.855.000.000	436.276.000.000	10,73%
2020	4.714.000.000.000	4.501.131.000.000	212.869.000.000	4,73%
2021	5.154.952.796.000	4.714.000.000.000	440.952.796.000	9,35%
2022	5.521.380.840.000	5.154.952.796.000	366.428.044.000	7,11%
Rata-rata				6,38%

Sumber: Data Sekunder yang diolah kembali (2023)

Berdasarkan perhitungan pertumbuhan pada Tabel 4.4 kita bisa melihat pertumbuhan target lima tahun terakhir ini berfluktuatif walaupun begitu pertumbuhan target ini menunjukkan angka yang positif. dengan rata-rata pertumbuhan angka sebesar 6,38%.

Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah sadar akan besarnya potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor , terlihat dengan meningkatnya target dari tahun ke tahun yang mengalami kenaikan walaupun sedikit, ini membuktikan optimisme Badan Pengelola Pendapatan Daerah akan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ini. Untuk mengetahui perbandingan Perkembangan Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022 secara lebih jelas maka dapat dilihat Grafik berikut:

Grafik 4.3 Presentase Pertumbuhan Target PKB tahun 2018-2022



Sumber: Data Sekunder yang diolah kembali (2023)

Berdasarkan Grafik 4.3 diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan target Pajak Kendaraan Bermotor terbesar berada pada tahun 2019 dengan angka 10,73%, dan angka pertumbuhan target terkecil berada pada tahun 2020 dengan angka 4,73%. Dengan begitu pertumbuhan target ini bisa dikatakan positif karena mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun tidak signifikan.

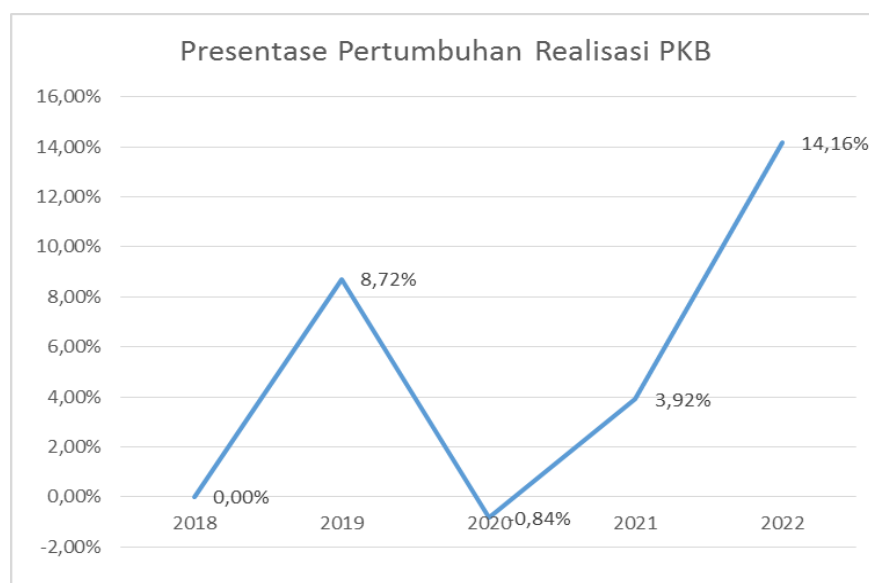
Melihat perkembangan target penerimaan Pajak kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 mengalami trend positif dengan begitu dapat dihitung pula pertumbuhan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor provinsi jawa tengah. Berikut merupakan Perhitungan Pertumbuhan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022:

Tabel 4. 5 Pertumbuhan Realisasi PKB Provinsi Jawa Tengah 2018-2022

Tahun	Realisasi	Realisasi Tahun Sebelumnya	Pertumbuhan Realisasi	Presentase Pertumbuhan Realisasi PKB
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4) / (3) x 100%
2018	4.248.132.806.425	4.248.132.806.425	-	0,00%
2019	4.618.496.197.625	4.248.132.806.425	370.363.391.200	8,72%
2020	4.579.535.646.300	4.618.496.197.625	-38.960.551.325	-0,84%
2021	4.758.837.286.600	4.579.535.646.300	179.301.640.300	3,92%
2022	5.432.537.592.000	4.758.837.286.600	673.700.305.400	14,16%
Rata-rata				5,19%

Sumber: Data Sekunder yang diolah kembali (2023)

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas pertumbuhan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor ini sangat berfluktuatif, untuk memperjelas maka dapat dilihat Grafik Pertumbuhan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 berikut:

Grafik 4. 4 Pertumbuhan Realisasi PKB Provinsi Jawa Tengah 2018-2022

Sumber: Data Sekunder yang diolah kembali (2023)

Berdasarkan Grafik 4.4 menunjukkan bahwa realisasi PKB bersifat positif dengan rata-rata 5,19%. Pertumbuhan realisasi pajak tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang menunjukkan peningkatan positif yang signifikan dengan angka 14,16%. Sedangkan pertumbuhan pajak terendah terjadi pada tahun 2020 yang menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar -0,84%.

Dilihat dari Tabel 4.5 dan Grafik 4.4 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2018 sebesar Rp. 402.019.864.925. pada tahun berikutnya yaitu tahun 2019 realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp. 370.363.391.200 sehingga menjadi Rp. 4.618.496.197.625 dengan pertumbuhan presentase sebesar 8,42%. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan sebesar Rp. 38.960.551.325 sehingga menjadi Rp. 4.579.535.646.300 dengan presentase penurunan sebesar -0,84% dari tahun 2019 yang bersifat negatif. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak Kendaraan Bermotor mengalami sedikit peningkatan seiring dengan meningkatnya ekonomi masyarakat pasca pandemi, sebesar Rp. 179.301.640.300 sehingga menjadi Rp. 4.758.837.286.600 dengan presentase pertumbuhan 3,92%. Pada tahun 2022 ini merupakan pertumbuhan realisasi terbesar dengan presentase pertumbuhan 14,16% dari tahun 2021, dengan kenaikan pertumbuhan sebesar Rp.673.700.305.400 sehingga realisasi penerimaan menjadi Rp. 5.432.537.592.000.

4.2.2.1 Perhitungan Efektivitas PKB

Tahun anggaran 2018-2022 Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menargetkan penerimaan PKB dengan cermat. Untuk

mengukur pencapaian target yang telah ditetapkan tersebut maka perlu diketahui pula tingkatan efektivitas penerimaan PKB tersebut.

Berikut merupakan tabel Perhitungan Efektivitas PKB Provinsi Jawa Tengah 2018-2022:

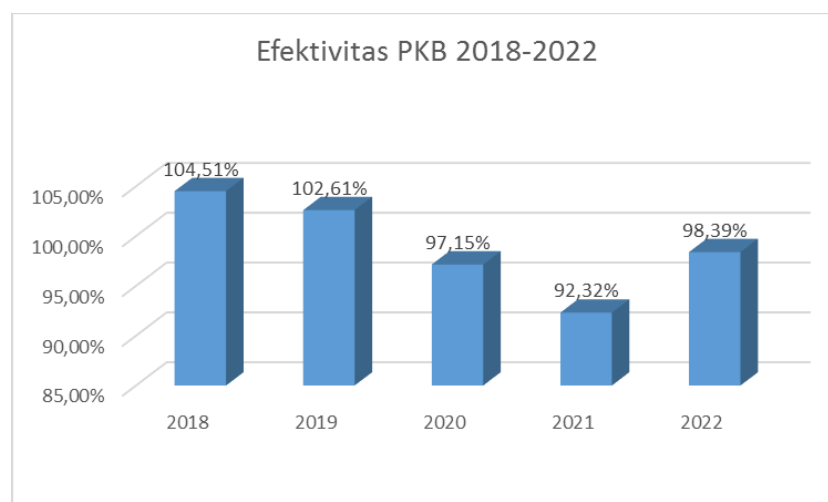
Tabel 4. 6 Efektivitas PKB 2018-2022

No	Tahun	Realisasi PKB	Target PKB	Efektivitas	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%	
1	2018	4.248.132.806.425	4.064.855.000.000	104,51%	Sangat Efektif
2	2019	4.618.496.197.625	4.501.131.000.000	102,61%	Sangat Efektif
3	2020	4.579.535.646.300	4.714.000.000.000	97,15%	Cukup Efektif
4	2021	4.758.837.286.600	5.154.952.796.000	92,32%	Cukup Efektif
5	2022	5.432.537.592.000	5.521.380.840.000	98,39%	Cukup Efektif

Sumber: Data Sekunder yang diolah kembali (2023)

Berdasarkan perhitungan Tabel 4.6, untuk mengetahui perbandingan tingkatan efektivitas PKB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 secara lebih jelas maka dapat dilihat grafik sebagai berikut:

Grafik 4. 5 Efektivitas PKB 2018-2022



Sumber: Data Sekunder yang diolah kembali (2023)

Tahun 2018 efektivitas penerimaan PKB sebesar 104,51% dengan kriteria sangat efektif. Lalu pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 102,61% namun masih dikategorikan sangat efektif dengan kata lain penurunan tersebut tidak menunjukkan kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah menjadi tidak efektif. Pada tahun 2020 penurunan efektivitas penerimaan PKB terus berlanjut yaitu sebesar 97,15% dengan kriteria cukup efektif. Tidak berhenti di tahun 2020 penurunan efektivitas penerimaan PKB mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 sebesar 92,32% di tahun ini merupakan persentase terkecil diantara tahun berjalan lainnya dimana persentase tersebut dikategorikan cukup efektif. Pada tahun 2022 efektivitas penerimaan PKB mulai mengalami peningkatan yang ditandai dengan meningkatnya persentase di tahun ini yaitu sebesar 98,39% meskipun masih dikategorikan cukup efektif dan bukan menjadi angka persentase tertinggi tetapi ini sebagai awal dari meningkatnya efektivitas setelah terjadinya penurunan secara terus-menerus.

Berdasarkan analisis efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah memiliki rata-rata tingkatan efektivitas dari tahun 2018-2022 sebesar 98,99% yang berarti memiliki kriteria cukup efektif maka dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah telah efektif dan dapat merealisasikan penerimaan PKB sesuai target yang ditentukan.

Melihat berfluktuifnya angka persentase Target, Realisasi, dan efektivitas ini menurut wawancara yang dilakukan dengan Badan Pengelola Pendapatan

Daerah Provinsi Daerah Provinsi Jawa Tengah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat selama masa pandemi *Covid19* dimana masyarakat lebih memilih menggunakan uangnya untuk mencukupi kebutuhan pokoknya dibanding membayar kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Ditiadaknya kegiatan razia rutin bersama POLRI selama pandemi;
3. Kegiatan Door To Door dalam rangka penanganan piutang Pajak Kendaraan Bermotor hanya dilakukan terbatas.
4. Penerapan PPKM yang menyebabkan pengurangan jam kerja pelayanan SAMSAT.
5. Belum maksimalnya pembayaran online dengan menggunakan aplikasi New Sakpole.

Melihat faktor-faktor diatas Badan Pengelola Penapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan beragam inovasi dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan untuk Pajak Kendaraan Bermotor, dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang teredia. Berikut merupakan beberapa upaya yang telah dilakukan oleh badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah:

1. Program Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor bagi wajib pajak yang dilakukan untuk memberi stimulus pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam rangka penanganan dampak penyebaran *Corona Virus*

Disease 2019. Pembebasan Denda ini di kukuhkan dengan Peraturan Gubernur sebagai berikut:

- a. PERGUB Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor bagi Masyarakat Jawa Tengah, berlaku sejak tanggal 19 Oktober 2020 - 19 Desember 2020.
 - b. PERGUB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Jawa Tengah, berlaku sejak tanggal 6 Mei-6 September 2021.
2. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor yang memiliki plat merah di JATENG, serta pelibatan perangkat pemerintah daerah untuk optimalisasi penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan se-Jawa Tengah;
 3. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkan kesadaran tepat waktu membayar pajak melalui media masa maupun media sosial serta melakukan penagihan terhadap wajib pajak menggunakan *Door To Door* yang bekerjasama dengan PKK, Babinkamtibmas, Ormas, dan Bumdes secara insentif dan efisien;
 4. Program peningkatan layanan SAMSAT dan inovasi BAPENDA Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan penerimaan PKB:
 - a. Menambah titik layanan dan menempatkan samsat keliling di tempat-tempat yang strategis

- b. Penyempurnan pembayaran online melalui layanan aplikasi berbasis android yaitu New Sakpole untuk mempermudah pembayaran secara *online*
- c. Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor dengan program Mitra Putra Bangsa (Pajak Untuk Rakyat Bangkit Bersama) dimana mengenai apresiasi bagi wajib pajak yang taat membayar pajak dan sekaligus membuka ruang untuk promosi bagi pelaku umkm yang terdampak pandemi.
- d. Melaksanakan program Gadis Pantura (Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat) upaya ini dilakukan untuk penanganan piutang dan memberi contoh kepada masyarakat bahwa kepatuhan membayar pajak melalui penegakan disiplin ASN.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai Bank dan BUMDES untuk membuat SAMSAT BUDIMAN yang fungsinya untuk memperluas jangkauan pelayanan pajak untuk mempermudah masyarakat yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

4.2.2.2 Kontribusi PKB Terhadap PAD

Analisis kontribusi penerimaan ini digunakan untuk mengukur seberapa sumbangsi suatu variabel yang menjadi bagian dari penerimaan daerah tersebut. Sebagaimana yang ada dalam Pendapatan Asli Daerah Pajak Kendaraan Bermotor tergabung dalam Pajak Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa tingkatan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah atau PAD. Untuk

mengetahui tingkatan kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

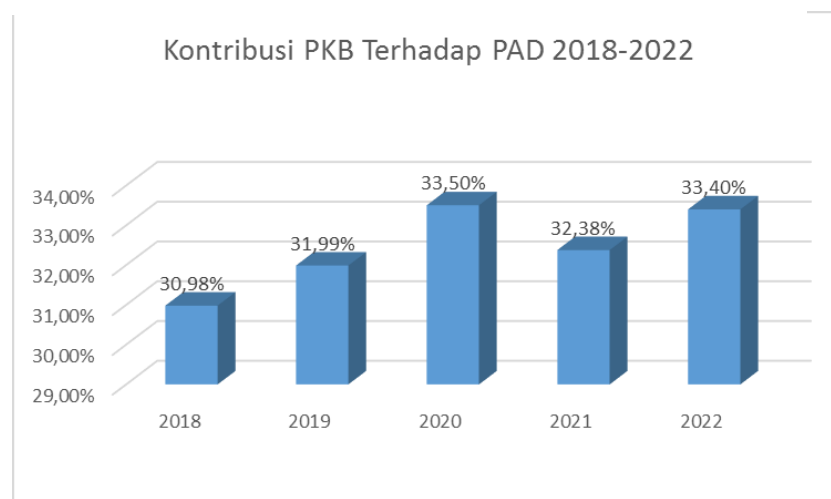
Tabel 4. 7 Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah 2018-2022

No	Tahun	Realisasi PKB	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%	
1	2018	4.248.132.806.425	13.711.836.037.849	30,98%	Cukup Baik
2	2019	4.618.496.197.625	14.437.779.112.256	31,99%	Cukup Baik
3	2020	4.579.535.646.300	13.668.282.278.855	33,50%	Cukup Baik
4	2021	4.758.837.286.600	14.697.721.017.860	32,38%	Cukup Baik
5	2022	5.432.537.592.000	16.264.700.573.304	33,40%	Cukup Baik

Sumber: Data Sekunder yang diolah kembali (2023)

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.7 presentase kontribusi PKB terhadap PAD mengalami kenaikan dan penurunan di beberapa tahun berjalan, untuk memperjelas penggambaran tingkatan kontribusinya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 4. 6 Kontribusi PKB terhadap PAD 2018-2022



Sumber: Data Sekunder yang diolah kembali (2023)

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022 dari grafik 4.6 terlihat peningkatan persentase di tiga tahun pertama, dari hasil perhitungan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa kontribusi PKB pada tahun 2018 30,98%. Pada tahun 2019 memiliki kontribusi sebesar 31,99%. Pada tahun 2020 memiliki kontribusi sebesar 33,50%. Pada tahun 2021 memiliki kontribusi sebesar 32,38%. Dan pada tahun terakhir memiliki kontribusi sebesar 33,40%.

Perhitungan kontribusi yang ada pada Tabel 4.7 antara tahun 2018-2022, kontribusi terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 30,98% dan kontribusi tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 33,50%, jika dihitung rata-rata kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2018-2022 yaitu sebesar 32,45% dengan kategori Cukup Baik. Ini menandakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dinilai sudah cukup baik dalam optimalisasi sumber penerimaan yang tergolong dalam objek Pajak Kendaraan Bermotor sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat di kategorikan cukup baik, ini dibuktikan dengan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2018-2022 pada Tabel 4.6 yang menyatakan penerimaan PKB sudah cukup efektif sehingga bisa berkontribusi lebih dalam menambah kas daerah.

4.2.3 Bea Balik Nama kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ialah suatu pajak daerah yang biasa disingkat BBNKB, juga merupakan salahsatu penyumbang penerimaan daerah, dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 20211 Tentang

Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak yang terjadi dikarenakan jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha, Bea Nama Kendaraan Bermotor dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. BBNKB I ialah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor untuk kendaraan motor baru.
2. BBNKB II ialah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor dalam dan luar Provinsi Jawa Tengah

Penerimaan BBNKB ini termasuk dalam Pajak Daerah dimana terdapat target yang di tentukan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan juga realisasi yang dilakukan untuk mencapai target yang sudah di tentukan. Berikut merupakan target dan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 :

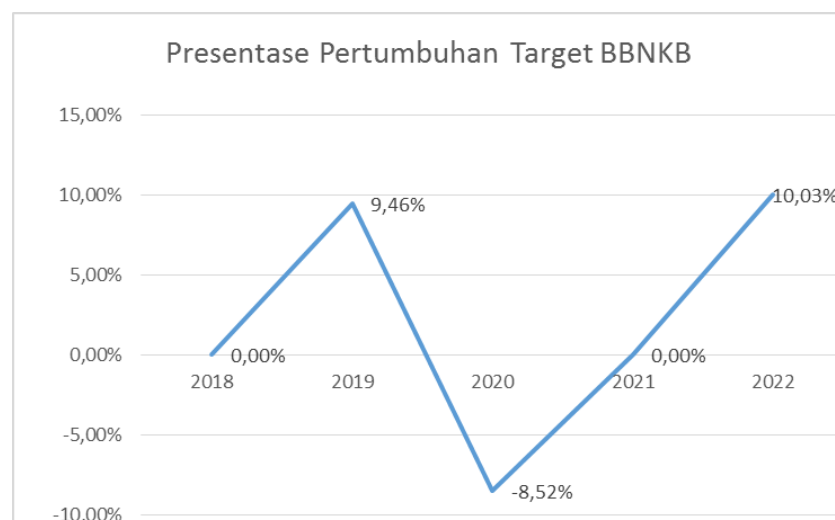
Tabel 4. 8 Pertumbuhan Target BBNKB 2018-2022

Tahun	Target	Target Tahun Sebelumnya	Pertumbuhan Target	Presentase Pertumbuhan Target BBNKB
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4) / (3) x 100%
2018	3.145.682.000.000	3.145.682.000.000	-	0,00%
2019	3.443.363.700.000	3.145.682.000.000	297.681.700.000	9,46%
2020	3.150.000.000.000	3.443.363.700.000	-293.363.700.000	-8,52%
2021	3.150.000.000.000	3.150.000.000.000	-	0,00%
2022	3.466.000.000.000	3.150.000.000.000	316.000.000.000	10,03%
Rata-rata				2,20%

Sumber: Data Sekunder yang diolah kembali

Berdasarkan perhitungan Tabel 4.8 diatas pertumbuhan target BBNKB 2018-2022 sangat berfluktuatif, meskipun begitu pertumbuhan menunjukkan rata-rata pertumbuhan target BBNKB Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,20% dimana dengan angka tersebut bisa dikatakan bersifat positif, pertumbuhan target terbesar terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp316.000.000.000 yang menunjukkan sifat positif, sementara pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang dimana penurunan ini bersifat negatif yaitu sebesar Rp. -293.363.700.000, untuk mengetahui tingkatan pertumbuhan target BBNKB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 secara lebih jelas maka dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 4. 7 Pertumbuhan Target BBNKB 2018-2022



Sumber: Data Sekunder yang diolah kembali

Grafik 4.7 menunjukkan pertumbuhan presentase terbesar berada pada tahun 2022 yaitu sebesar 10,03% yang bersifat positif, dan presentase terkecil yaitu terdapat pada tahun 2020 sebesar -8,52% yang bersifat negatif. Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah menilai bahwa pada tahun 2020 potensi penerimaan BBNKB rendah dikarenakan

penurunan perputaran ekonomi yang di sebabkan oleh pandemi, menurunnya daya beli masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memproses balik nama kendaraan motornya mendesak pemerintah dalam hal ini BAPENDA untuk menentukan kebijakan yang sekiranya bisa di terapkan pada saat pandemi, oleh karena itu Pemerintah daerah mengevaluasi untuk menyesuaikan dengan kondisi dan memutuskan untuk menurunkan target BBNKB.

Target BBNKB ini di buat untuk tujuan utama penerimaan BBNKB dimana dengan target ini kita juga bisa melihat realisasi atau pencapaian penerimaan BBNKN terhadap target yang di tetapkan. Berikut merupakan realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022:

Tabel 4. 9 Pertumbuhan Realisasi BBNKB 2018-2022

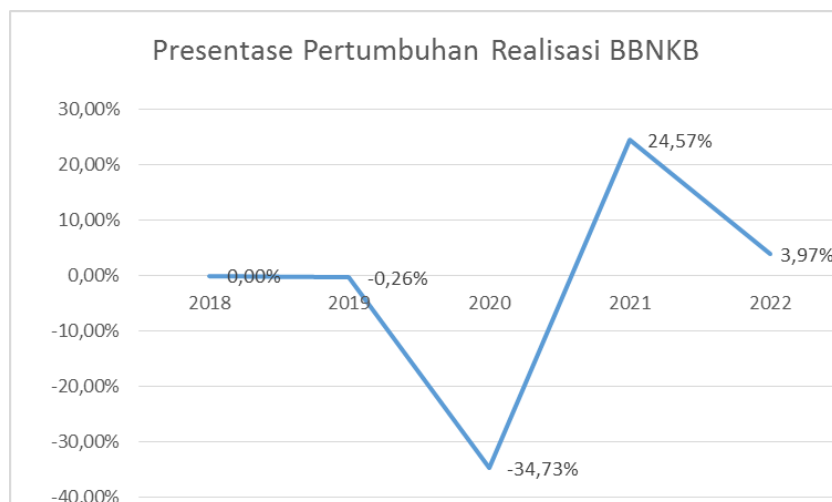
Tahun	Realisasi	Realisasi Tahun Sebelumnya	Pertumbuhan Realisasi	Presentase Pertumbuhan Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4) / (3) x 100%
2018	3.423.363.674.275	3.423.363.674.275	-	0,00%
2019	3.414.320.120.325	3.423.363.674.275	-9.043.553.950	-0,26%
2020	2.228.465.305.800	3.414.320.120.325	-1.185.854.814.525	-34,73%
2021	2.775.978.070.000	2.228.465.305.800	547.512.764.200	24,57%
2022	2.886.089.450.650	2.775.978.070.000	110.111.380.650	3,97%
Rata-rata				-1,29%

Sumber: Data sekunder yang diolah kembali (2023)

Berdasarkan perhitungan Tabel 4.9 diatas pertumbuhan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2018-2022 sangat berfluktuatif dengan rata-rata persentase pertumbuhan realisasi sebesar -1,29% yang bersifat negatif. Diketahui realisasi penerimaan pada tahun 2018 sebesar Rp.3.423.363.674.275. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp.9.043.553.950 menjadi Rp. 3.414.320.120.325. Penurunan terus terjadi dimana

di tahun 2020 realisasi BBNKB menunjukkan hasil sebesar Rp.-1.185.854.814.525, penurunan ini menjadi penurunan terbesar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sementara pada tahun 2021 perhitungan pada tabel menunjukkan pertumbuhan realisasi BBNKB yang bersifat positif dimana pada taun ini menunjukkan angka sebesar Rp.547.512.764.200; penerimaan tersebut menjadi awal kenaikan pertumbuhan realisasi penerimaan BBNKB dan sekaligus menjadi yang terbesar dalam Tabel 4.9 tersebut. Pertumbuhan realisasi terus berlanjut pada tahun 2022 realisasi penerimaan BBNKB Provinsi Jawa Tengah yaitu Rp.2.886.089.450.650 dengan kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp.110.111.380.650, untuk lebih jelas melihat pertumbuhan realisasi penerimaan BBNKB 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 4. 8 Pertumbuhan Realisasi BBNKB 2018-2022



Sumber: Data Sekunder yang diolah kembali (2023)

Grafik 4.8 diatas menunjukkan pertumbuhan realisasi BBNKB pada awal tahun 2019 menunjukkan sifat yang negatif, meski begitu penurunan ini masih dikategorikan wajar karena mengalami penurunan sebesar 0,26%, tetapi pada tahun

selanjutnya penurunan ini terjadi kembali pada tahun 2020 dimana penurunan pada tahun ini bisa dibilang sangat parah karena menunjukkan angka sebesar -34,73%, angka tersebut menjadi penurunan terbesar dalam Grafik 4.8. Pada tahun 2021 pertumbuhan realisasi BBNKB bisa dibilang mulai membaik dimana grafik sudah menunjukkan kenaikan yang positif dengan angka 24,57%. Namun kenaikan pada tahun 2021 tidak berlanjut, pada tahun 2022 penurunan kembali terjadi yaitu sebesar 3,97% walaupun penurunan ini tidak bersifat negatif tetapi tetap saja pertumbuhan dalam grafik sangat berfluktuatif. Pemerintah dalam hal ini Badan pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah harus merancang program yang sekiranya dapat mengatasi dan mengoptimalkan pertumbuhan realisasi BBNKB.

4.2.3.1 Perhitungan Efektivitas BBNKB

Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang untuk menentukan target dan menerima realisasi BBNKB, untuk melihat sejauh mana kebijakan dan pencapaian target tersebut maka perlu di ketahui tingkatan efektivitasnya. Berikut merupakan tabel analisis efektivitas BBNKB Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022:

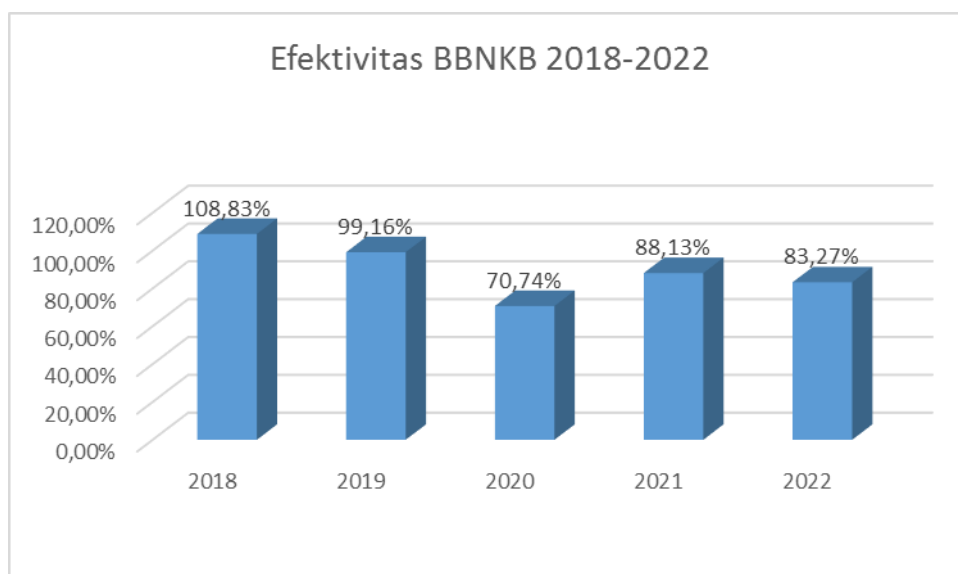
Tabel 4. 10 Efektivitas BBNKB 2018-2022

No	Tahun	Realisasi BBNKB	Target BBNKB	Efektivitas	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5) = (3) / (4) \times 100\%$	
1	2018	3.423.363.674.275	3.145.682.000.000	108,83%	Sangat Efektif
2	2019	3.414.320.120.325	3.443.363.700.000	99,16%	Efektif
3	2020	2.228.465.305.800	3.150.000.000.000	70,74%	Tidak Efektif
4	2021	2.775.978.070.000	3.150.000.000.000	88,13%	Kurang Efektif
5	2022	2.886.089.450.650	3.466.000.000.000	83,27%	Kurang Efektif

Sumber: Data Sekunder yang diolah kembali (2023)

Berdasarkan Tabel 4.10 Efektivitas BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022 menunjukkan hasil yang beragam dimana efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan angka 108,83% dengan kriteria Sangat Efektif, sementara efektivitas terendah terjadi pada tahun 2020 dengan kriteria Tidak Efektif. Untuk mengetahui perbandingan tingkatan efektifitas dengan jelas maka dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 4. 9 Efektivitas BBNKB 2018-2022



Sumber: Data Sekunder yang diolah kembali (2023)

Tahun 2018 efektifitas penerimaan BBNKB sebesar 108,83% dengan kriteria Sangat Efektif, ini merupakan suatu pencapaian yang baik dimana angka perhitungan menunjukkan kriteria yang baik. Pada tahun 2019 terjadi penurunan dengan angka efektivitas sebesar 99,16% meskipun terjadi penurunan angka tersebut masih dikategorikan Efektif. Pada tahun selanjutnya yaitu 2020 penurunan masih terjadi dimana angka efektivitas pada tahun ini menunjukkan angka 70,74% angka tersebut merupakan angka efektivitas terendah dan masuk dalam kriteria

Tidak Efektif, dengan kriteria ini menunjukkan bahwa pencapaian target yang di buat belum tercapai secara maksimal, pada tahun 2021 angka efektifitas BBNKB mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun ini meningkat menjadi 88,13%, meskipun meningkat tetapi pencapaian target dan penerimaan dirasa belum memenuhi target dikarenakan angka tersebut mendapat kriteria Kurang Efektif, dan pada tahun terakhir yaitu 2022 angka efektifitas mengalami penurunan kembali menjadi 83,27% dengan kriteria Kurang Efektif. Melihat banyaknya penurunan dan sedikit peningkatan pada perhitungan menurut wawancara yang dilakukan dengan Badan Pengelola pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Masih banyak masyarakat yang berdomisili di wilayah Jawa Tengah belum melakukan balik nama atas kendarannya, sehingga pajak yang dibayarkan orang tersebut tidak masuk kedalam kas daerah yang bersangkutan;
2. Masih banyak masyarakat yang belum menertibkan administrasi atas kepemilikan kendaraan bermotor dimana kepemilikan kendaraan bermotor tersebut masih atas nama pembeli pertama dan mempengaruhi penerimaan BBNKB II;
3. Menurunnya tingkat ekonomi masyarakat dikarenakan pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat atas kendaraan baru sehingga mempengaruhi penerimaan BBNKB I.

Berikut merupakan beberapa upaya yang telah dilakukan oleh badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah:

1. Program Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor bagi wajib pajak yang dilakukan untuk memberi stimulus pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam rangka penanganan dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019*. Pembebasan Denda ini di kukuhkan dengan Peraturan Gubernur sebagai berikut:
 - a. PERGUB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan Bermotor Dalam Dan Dari Luar Provinsi Jawa Tengah Dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai Bank dan BUMDES untuk membuat SAMSAT BUDIMAN yang fungsinya untuk memperluas jangkauan pelayanan pajak untuk mempermudah masyarakat yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
3. Membuat pameran otomotif bernama *Grand Automotif Show* dan *GAIKINDO Indonesia Internasional Auto Show (GIAS2022)* untuk menarik masyarakat Jawa Tengah untuk membeli kendaraan baru dengan domisili di Jawa Tengah.

4.2.3.2 Kontribusi BBNKB terhadap PAD 2018-2022

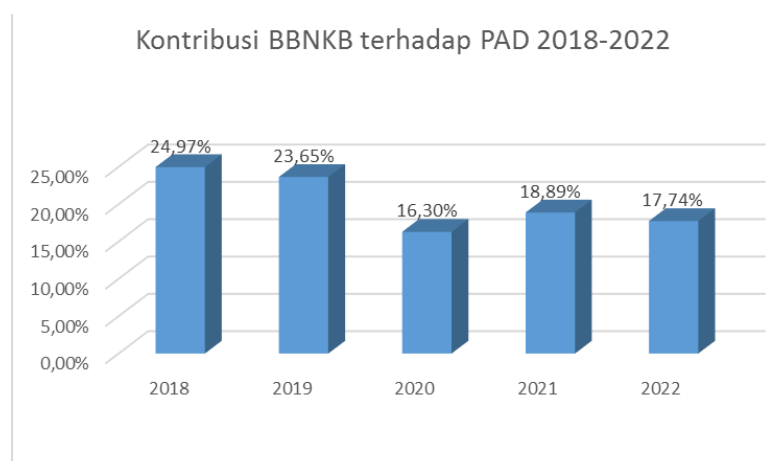
Analisis kontribusi digunakan untuk mengukur seberapa sumbangsi suatu variabel yang menjadi bagian dari penerimaan daerah tersebut. Sebagaimana yang ada dalam Pendapatan Asli Daerah, Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa tingkatan kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

Tabel 4. 11 Kontribusi BBNKB terhadap PAD 2018-2022

No	Tahun	Realisasi BBNKB	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5) = (3) / (4) \times 100\%$	
1	2018	3.423.363.674.275	13.711.836.037.849	24,97%	Sedang
2	2019	3.414.320.120.325	14.437.779.112.256	23,65%	Sedang
3	2020	2.228.465.305.800	13.668.282.278.855	16,30%	Kurang
4	2021	2.775.978.070.000	14.697.721.017.860	18,89%	Kurang
5	2022	2.886.089.450.650	16.264.700.573.304	17,74%	Kurang

Sumber: Data Sekunder yang diolah kembali (2023)

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa angka Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah berfluktuatif, dimana kriteria paling tinggi dalam tabel menunjukkan Sedang sementara pada tahun lainnya menunjukkan angka kontribusi yang jauh di bawahnya, ini membuktikan tingkat kontribusi BBNKB masih belum optimal. Untuk menggambarkan tingkatan Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022 maka dapat melihat grafik berikut:

Grafik 4. 10 Kontribusi BBNKB terhadap PAD 2018-2022

Sumber: Data Sekunder yang diolah kembali (2023)

Berdasarkan Grafik 4.10 terlihat penurunan angka kontribusi BBNKB dari tahun 2018-2020 dimana angka kontribusi BBNKB pada tahun 2018 sebesar 24,97% dengan kriteria Sedang. Sementara pada tahun 2019 mengalami penurunan dan menunjukkan angka kontribusi sebesar 23,65% dengan kriteria Sedang. Penurunan terus terjadi hingga tahun 2020 dimana pada tahun ini merupakan angka kontribusi terkecil yaitu sebesar 16,30% dengan kriteria Kurang dengan kriteria tersebut diketahui kurang optimalnya penerimaan BBNKB yang di buktikan kurangnya kontribusi BBNKP terhadap PAD pada tahun 2020. Pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu menambahkan program-program yang mendukung agar kontribusi BBNKB ini optimal, dan memaksimalkan penerimaan BBNKB agar lebih berkontribusi dalam penerimaan daerah.

4.3 Interpretasi Hasil

4.3.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Analisis Efektivitas pada tabel 4.6 diatas menunjukkan angka efektivitas tertinggi berada pada tahun 2018 dengan persentase 104,51% dengan kategori Sangat Efektif ini merupakan suatu pencapaian yang sangat bagus karena bisa melebihi target yang telah ditetapkan, sementara angka persentase efektivitas terendah berada pada tahun 2021 dengan persentase 92,32% walaupun terkecil dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tetapi masih dalam kriteria Cukup Efektif, dengan begitu dapat disimpulkan dengan rata-rata persentase efektivitas 98,99% penerimaan pajak kendaraan bermotor di kategorikan Cukup Efektif, dengan kata

lain Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah baik dalam menentukan target dan dalam realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah.

Berdasarkan Tabel 4.10 Analisis Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2018 menunjukkan hasil persentase yang tinggi yaitu sebesar 108,83% dengan kriteria Sangat Efektif, namun sayang pada tahun selanjutnya persentase penerimaan BBNKB mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan terbukti pada tahun 2020 persentase mengalami penurunan yang cukup besar menjadi 70,74% dengan kriteria Tidak Efektif. Meskipun begitu dengan menghitung rata-rata efektivitas penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2018-2022 menunjukkan angka persentase sebesar 90,02% dengan kriteria Cukup Efektif.

4.3.2 Kontribusi PKB dan BBNKB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor cukup berkontribusi terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah, ini dibuktikan pada Tabel 4.7 kontribusi PKB terhadap PAD selama tahun 2018-2022 menunjukkan rata-rata kontribusi sebesar 32,45% dengan kriteria Cukup Baik, persentase kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2020 dengan angka 33,50% dengan kriteria Cukup Baik, sementara angka persentase terendah terjadi pada tahun 2018 dengan angka persentase 30,98% dengan kriteria Cukup Baik, ditandai dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang mengalami kenaikan positif dan perhitungan efektivitas yang menunjukkan kriteria cukup efektif.

Tabel 4.11 menunjukkan kontribusi BBNKB terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah, dimana persentase pada tahun 2018 menunjukkan angka 24,97% dimana pada tahun ini kontribusi di kategorikan Sedang berarti pada tahun ini BBNKB cukup berkontribusi terhadap PAD, pada tahun 2019 kontribusi BBNKB mengalami sedikit penurunan menjadi 23,65%, penurunan terus terjadi hingga tahun 2020 dengan persentase 16,30% dan menjadi kontribusi terkecil selama lima tahun terakhir dengan kriteria kurang berkontribusi, pada tahun 2021 kontribusi BBNKB mengalami kenaikan menjadi 18,89% walaupun mengalami kenaikan tetapi masih dikategorikan kurang berkontribusi atas dasar tabel kriteria yang belum menyentuh angka $> 20\%$ agar bisa dikategorikan sedang, dan pada tahun 2022 kontribusi mengalami penurunan kembali menjadi 17,74% dengan kriteria kurang. Melihat dari persentase dari lima tahun terakhir kita bisa menghitung rata-rata kontribusi BBNKB terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 20,31% dengan kriteria sedang dan cenderung negatif ini di kemukakan juga berdasarkan wawancara dengan badan pengelola pendapatan daerah yang mengakui bahwa banyak kekurangan dalam penerimaan BBNKB ini, ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang berdomisili di wilayah Jawa Tengah belum melakukan balik nama atas kendaraannya, sehingga penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor belum optimal.

Teori institusional ini sudah relevan untuk menjelaskan penelitian ini karena organisasi atau instansi yang memiliki kebijakan dan digunakan untuk masyarakat untuk menjalankan kewajiban membayar pajaknya. Sesuai teori institusional juga mendukung kebijakan yang mempengaruhi variabel independen berupa Pendapatan

Asli Daerah dan dimana suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan juga bea balik nama kendaraan bermotor hal ini tentu saja mempengaruhi pula terhadap efektivitas penerimaan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Naik turunnya efektivitas dan kontribusi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya penurunan ekonomi masyarakat, kurang optimalnya penerapan program yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dikarenakan ada pembatasan yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19*, dan juga dimunculkannya kebijakan berupa penghapusan denda administrasi, keringanan pajak dan juga pembebasan biaya BBNKB II, dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdul Muis dan Satria Adhitama (2021), Adnan Besari dan Myra Salsabila (2021) dimana penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sudah cukup efektif namun untuk kontribusinya terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah dirasa belum cukup berkontribusi, ini menandakan pemerintah yaitu Badan Pengelola Pendapatan Daerah harus sedikit berbenah mengenai penanganan BBNKB untuk meningkatkan penerimaan BBNKB agar lebih bisa berkontribusi terhadap PAD.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa tinggi efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah dan juga mengukur seberapa jauh kontribusi yang diberikan penerimaan tersebut kepada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan dari hasil analisis efektivitas dan analisis kontribusi serta interpretasi hasil dari penelitian ini, efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah sudah cukup tinggi dibuktikan dengan perhitungan pertumbuhan target yang dilakukan menunjukkan pertumbuhan yang terus meningkat dan menunjukkan angka efektifitas rata-rata sebesar 98,99% dengan kriteria Cukup Efektif
2. Tingkat efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah sangat berfluktuatif dimana mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan meskipun begitu rata-rata analisis efektifitas bea

balik nama kendaraan bermotor menunjukkan persentase yang dapat dikategorikan Cukup Efektif dengan persentase sebesar 90,02%.

3. Berdasarkan analisis kontribusi yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan tingkat kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan Cukup Baik dengan persentase 32,45% ini membuktikan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor sudah cukup berkontribusi dalam menambah Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Tingkat kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil analisis kontribusi yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan rata-rata persentase sebesar 20,31% dengan kriteria Sedang, maka tingkat kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah ini dapat dikatakan sedikit berkontribusi dalam menyumbang Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

5.2 Keterbatasan

Melakukan penelitian ini tentunya memiliki beberapa faktor yang menghambat, penulis menemukan beberapa keterbatasan-keterbatasan yang didapat dalam penelitian ini, adapun keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Data sekunder yang diambil merupakan data kumulatif dari beberapa UPPD yang dimana data baru tersedia jika pelaporan tiap UPPD sudah di terima oleh Badan Pengelola Provinsi Jawa Tengah.

2. Sulitnya menyesuaikan waktu wawancara dan pembahasan terkait penelitian dengan narasumber yang berkaitan, dikarenakan kesibukan jam kerja dan banyaknya kegiatan.

5.3 Saran

Melihat dari hasil penelitian maka sebagai bahan pertimbangan untuk menjadi gagasan kedepannya yang diharapkan bisa membantu meningkatkan efektifitas dan kontribusi penerimaan PKB dan BBNKB terhadap pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah serta penelitian selanjutnya maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
 - a. Melakukan inovasi program terkait dengan optimalisasi dalam mengolah potensi penerimaan PKB dan BBNKB yang dalam hal ini adalah potensi piutang PKB yang sekiranya dapat dioptimalkan dan bisa menambah penerimaan pajak
 - b. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kendaraan bermotor menggunakan media sosial maupun media masa dengan cara yang baru.
 - c. Memberikan fasilitas untuk masyarakat yang berada jauh dari ruang lingkup UPPD untuk dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor maupun melakukan proses balik nama kendaraan bermotor, dan mengembangkan teknologi pembayaran untuk memperluas jangkauan pelayanan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk penelitian selanjutnya menambahkan sasaran objek penelitian yang berkaitan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sehingga penelitian akan lebih terperinci dan jelas mengenai alur efektifitas dan kontribusi dalam PAD, dan menambahkan perhitungan yang rinci sampai ke-tingkat UPPD dengan menambahkan laju pertumbuhan dan efektivitas per daerah sehingga hasil penelitian akan lebih maksimal.